

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan adalah upaya mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa Indonesia telah mengambil langkah yang sangat tepat dan strategis dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Langkah ini tercermin dalam rumusan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 4 yang berbunyi :

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 , bahwa : "(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang ".

Usaha pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui satuan-satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, maka ditentukan UU No. 2 Tahun 1989 tentang SPN pasal 47, ayat 1 – 2

yang menyatakan peran serta masyarakat dalam pendidikan, yaitu : (1) masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, (2) ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

Berbagai upaya untuk mencapainya dilakukan secara formal melalui berbagai jenjang pendidikan. Salah satu upaya tersebut dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, bab I, pasal 2 bahwa tujuan Pendidikan Tinggi adalah :

- 1) **menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;**
- 2) **mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.**

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan tinggi menduduki posisi yang sangat strategis untuk membentuk manusia yang tidak saja memiliki kemampuan akademik tetapi memiliki kemampuan profesional. Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut diperlukan dukungan sumber daya (manusia dan non manusia) secara penuh. Dana merupakan sumber yang sangat dibutuhkan, sebab setiap kegiatan pendidikan memerlukan biaya. “ Semua rekayasa dalam membangun bidang pendidikan baik secara makro, meso maupun mikro

mempunyai kaitan langsung dengan biaya pendidikan “ (Moch. Idochi Anwar, 1990 : 1), dan “pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya besar “ (Tilaar, 1991 : 52). Karena pendidikan yang bermutu adalah mahal , maka untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Di satu pihak kebutuhan akan biaya semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pendidikan, sedangkan di lain pihak biaya yang tersedia sangat terbatas. Sumber dana pendidikan dari pemerintah cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan peran biaya pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan sangat erat hubungannya dengan mutu pendidikan.

Gambaran empirik tentang pentingnya biaya pendidikan dan semakin terbatasnya biaya pendidikan dari pemerintah mendorong timbulnya berbagai upaya manajemen yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk administrator pendidikan, agar diperoleh biaya pendidikan dari berbagai pihak untuk membiayai pendidikan sehingga pendidikan di sekolah berjalan efektif (Ace Suryadi dan Tilaar, 1993 : 22).

Penelitian yang dimaksud dalam konteks di atas adalah tentang upaya menggali sumber-sumber biaya pendidikan agar layanan pendidikan efektif dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan pendidikan dapat diatasi. Upaya penggalan sumber dana tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu masalah ini adalah aktual untuk

diteliti dan dianalisis, terlebih setelah diberlakukannya otonomi pendidikan yang menuntut setiap Perguruan Tinggi untuk benar-benar mandiri.

Pendidikan dan segala permasalahannya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan masalah-masalah di luar sektor pendidikan. Pendidikan sebagai institusi masyarakat, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat setempat.

Masyarakat Kuningan menurut data Profil Pendidikan Tahun 1999/2000 s.d. 2001/2001 dibedakan berdasarkan mata pemcaharian, yaitu ; yang mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, perburuhan dan perikanan sebanyak 164.313 orang; di sektor penggalian sebanyak 268 orang ; di sektor industri pengolahan sebanyak 18.648 orang ; di sektor listrik,gas dan air sebanyak 2.675 orang; di sektor bangunan sebanyak 23.500 orang; di sektor perdagangan sebanyak 105.160 orang ; di sektor angkutan sebanyak 15.049 orang ; di sektor keuangan sebanyak 764 orang ; dan di sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 619.060 orang.

Sumber daya alam baik yang terkandung di daratan maupun di sungai merupakan potensi ekonomi yang besar. Kuningan mempunyai sumber daya alam yang beraneka ragam. Hasil utama pertanian berupa padi, palawija, sayur mayur dan buah-buahan. Sedangkan hasil utama perkebunan adalah tembakau, tebu, melinjo, aren, kopi, kelapa, cengkeh,

kapuk/kapas, jati, pinus dll. Hasil utama perikanan adalah udang dan ikan darat. Hasil utama peternakan berupa kerbau, kambing, domba dan unggas. Sedangkan hasil utama kehutanan berupa kayu jati, mahoni dan albasia.

Penghasilan masyarakat Kuningan bervariasi mulai dari Rp.150.000,00 sampai dengan > Rp.1 juta rupiah perbulan. Rata-rata income perkapita adalah Rp. 800.000,00 serta UMR yang berlaku adalah Rp.6.500,00.

Keadaan masyarakat Kuningan sebagaimana diuraikan di atas merupakan asset penting yang dapat mendukung pembangunan pendidikan termasuk pembiayaan pendidikan tinggi.

Uraian di atas memberi gambaran betapa pentingnya studi mengenai upaya penggalian sumber dana pendidikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi sangat menarik untuk diteliti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan yang baik menuntut tersedianya biaya yang cukup memadai;
2. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 dijelaskan bahwa peranserta masyarakat ikut memelihara, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan nasional ;
3. Secara teknis, peranserta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran terhadap pembiayaan pendidikan,

4. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang diberikan masyarakat dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lain yang sejenis (PP No 39, 1992 pasal 4, ayat 5).

Berdasarkan studi pendahuluan, dapat diketahui bahwa animo mahasiswa pada STKIP Kuningan dua tahun terakhir ini semakin meningkat. Tahun 1999/2000 tercatat 504 orang, tahun 2000/2001 tercatat 715 orang sedangkan tahun 2001/2002 meningkat menjadi 943 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa STIE Kuningan pada tahun 1999/2000 tercatat 153 orang, tahun 2000/2001 sebanyak 229 orang dan tahun 2001/2002 berjumlah 355 orang. Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran dana di masing-masing lembaga. Kebutuhan dana operasional dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan pun meningkat.

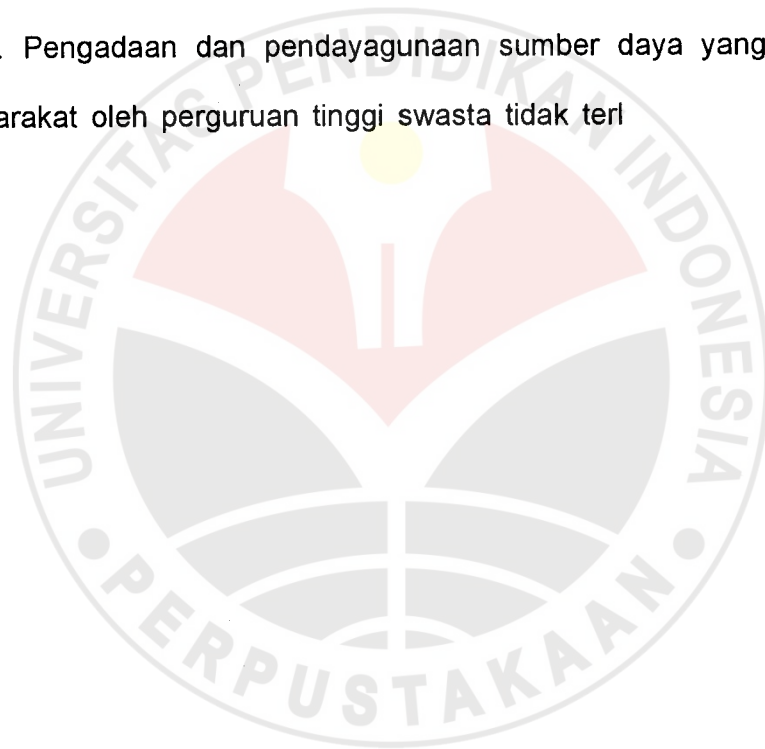
STKIP dan STIE Kuningan yang sepenuhnya bergantung pada kontribusi dana masyarakat, memerlukan perhatian besar dari pihak-pihak terkait. Keterbatasan kemampuan dana dan sarana prasarana pada STKIP dan STIE Kuningan sudah saatnya mendapat perhatian yang serius.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan kajian tentang pembiayaan pendidikan tinggi dengan judul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI (Kajian Deskriptif Tahun Akademik 1999/2000 s.d. 2001/2002

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI (Kajian Tahun Akademik 1999/2000 s.d. 2001/2002 pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kabupaten Kuningan)”.

B. Rumusan Masalah

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada hakekatnya berkembang sejalan dengan kemampuan pengelolaannya, baik oleh pengurus yayasan maupun administrator untuk mengelola sumber daya yang ada pada masyarakat. Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada masyarakat oleh perguruan tinggi swasta tidak terl



menggali sumber daya masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu upaya atau strategi untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan terutama dalam hal pembiayaan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka timbul pertanyaan yang penulis jadikan sebagai sebuah perumusan masalah, yaitu : Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan dampaknya terhadap layanan pendidikan pada STKIP dan STIE di Kabupaten Kuningan ?

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan ?
2. Sumber-sumber dana masyarakat apa saja yang dapat digali untuk mendapatkan diversifikasi pendapatan ?
3. Ke dalam unsur-unsur pembiayaan manakah dana masyarakat tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan ?
4. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan dalam melaksanakan pertanggungjawaban dana yang diperoleh dan dimanfaatkan ?
5. Apa hasil-hasil yang diperoleh dari dana yang digunakan ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam

pembiayaan pendidikan tinggi khususnya di STKIP dan STIE Kuningan, serta memberi informasi mengenai pengelolaan sumber dana masyarakat pada STKIP dan STIE di Kabupaten Kuningan.

Sedangkan Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan strategi yang digunakan dalam menggali sumber dana masyarakat.
- b. Mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berasal dari dana masyarakat dengan mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran dari setiap kegiatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu memperdalam kajian administrasi pendidikan, khususnya pembiayaan pendidikan baik sebagai penguatan dan penerapan konsep teori ekonomi pendidikan maupun praktek dalam administrasi pendidikan.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengkajian pembiayaan pendidikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Kuningan. Dan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berwenang dalam menangani pembiayaan PTS di Kabupaten Kuningan.



E. Premis

Beberapa premis yang mendasari penelitian ini adalah sebagai

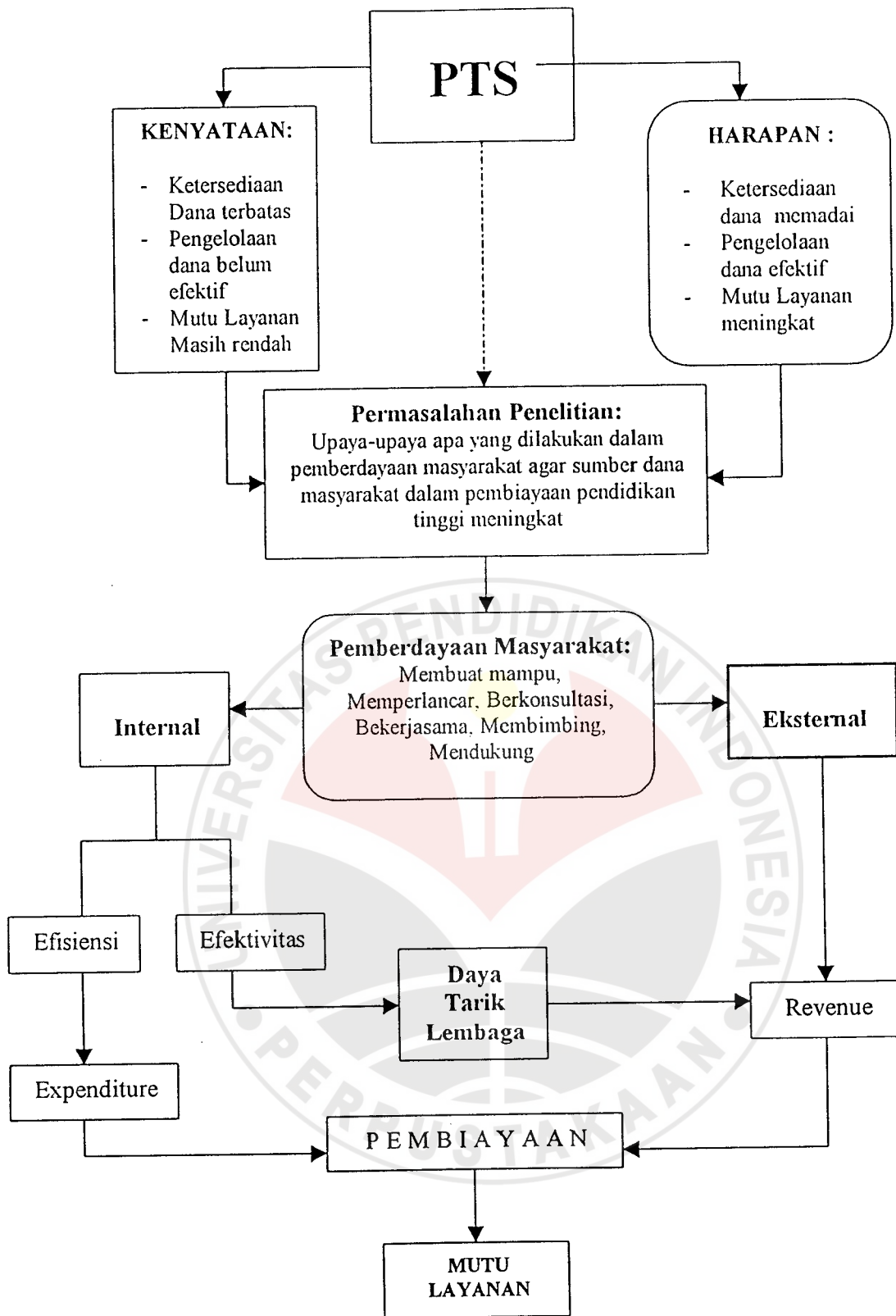
berikut :

1. Pendidikan tinggi menduduki posisi yang sangat strategis untuk membentuk manusia yang tidak saja memiliki kemampuan akademik tetapi memiliki kemampuan professional yang tinggi. Oleh karena itu pendidikan tinggi memiliki nilai investasi yang dapat diukur dengan pendapatan. Artinya pendidikan tinggi mempunyai nilai ekonomi yang dapat dikaji dari aspek pembiayaan dan manfaatnya (*Cost Benefit Analysis*) baik manfaat perorangan maupun sosial (Cohn , 1979).
2. Pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya besar (Tilaar, 1991 : 52). Karena pendidikan yang bermutu adalah mahal, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya pendidikan yang dipergunakan untuk menyediakan input dan proses akan berpengaruh terhadap mutu lulusan. Biaya pendidikan tinggi ditunjukkan dalam bentuk pembayaran untuk menyediakan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan dalam mengoperasionalkan kelembagaan pendidikan baik dalam bentuk sarana, fasilitas, maupun gaji personil (Bowen, 1981).
3. Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang mengarah kepada upaya memampukan masyarakat kecil atau bawahan (karyawan, warga masyarakat) yang selama ini dianggap tidak atau kurang berperan agar meningkat dan memiliki kemampuan yang lebih baik

sesuai dengan peranan mereka di dalam sistem sosial. Pemberdayaan dalam ruang lingkup manajemen dapat diartikan sebagai “ cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri sendiri dan para karyawannya” (Aileen Mitchel Stewart, 1998 :22). Hal ini berarti bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajer. Untuk itu Aileen Mitchel Stewart (1998 :22) mempersyaratkan kecakapan khusus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (*empowering people*), yaitu : (1) Membuat mampu (*enabling*); (2) Memperlancar (*facilitating*); (3) Berkonsultasi (*consulting*); (4) Bekerjasama (*collaborating*); (5) Membimbing (*mentoring*); dan (6) Mendukung (*supporting*).

F. Paradigma Penelitian

Bogdan dan Biklen mendefinisikan paradigma sebagai “kumpulan longgar dari sebuah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian” (Moleong, 1998:30). Paradigma juga memiliki pengertian sebagai (1) suatu model dalam teori ilmu pengetahuan, dan (2) kerangka berfikir. Kerangka berfikir merujuk pada premis yang didasarkan pada posisi untuk mengarahkan penelitian. Kerangka fikir penelitian ini diilustrasikan dalam gambar 1.1



Gambar 1.1 Kerangka fikir penelitian

Gambar tersebut menjelaskan bahwa ada sejumlah harapan yang diinginkan PTS. Sumber dana yang memadai sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sumber dana sangat terbatas dan pengelolaan dana belum efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat .

Masyarakat sebagai sumber penerimaan dana, ide, sarana, keahlian dan sebagainya sudah saatnya untuk dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi semaksimal mungkin. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tinggi menuntut seorang manajer untuk melakukan intervensi terhadap masyarakat , baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal yaitu ; membuat mampu (enabling), memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consulting), bekerjasama (collaborating), membimbing (mentoring) dan mendukung (supporting).

Pemberdayaan internal lebih difokuskan pada efisiensi (penghematan pengeluaran) dan efektivitas kinerja SDM yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik lembaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka mau membeli jasa lembaga. Sedangkan pemberdayaan eksternal lebih difokuskan pada upaya penggalian dana untuk meningkatkan penerimaan (*revenue*).Kedua strategi tersebut akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan tinggi sehingga dapat pula meningkatkan mutu layanan.

Masyarakat sebagai sumber dana, artinya warga masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan

melalui pembiayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1982 : 222) bahwa sumber penerimaan dana sekolah digolongkan atas ; 1) Bantuan dari masyarakat ; 2) Bantuan dari siswa atau orang tua murid ; 3) Bantuan dari pemerintah.

Masyarakat sebagai sumber ide, Made Pidarta (1986 : 346) mengemukakan bahwa ; “ Sebagai sistem terbuka, sekolah selalu membukakan pintu terhadap kehadiran warga masyarakat, terhadap ide-ide mereka, terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka, dan terhadap nilai-nilai yang ada pada masyarakat “. Selain itu “civitas academica” khususnya mahasiswa dan dosen membutuhkan masyarakat sebagai tempat penelitian atau praktek lapangan.

Masyarakat sebagai sumber sarana dan prasarana, artinya bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pada suatu lembaga pendidikan akan dapat tertolong dengan menciptakan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tim Dosen MKDK Administrasi Pendidikan (1991 : 109) :” Bahwa banyak diantara sekolah-sekolah yang terbentur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan yang baik dengan masyarakat memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut “.

Potensi masyarakat seyogyanya dimanfaatkan dan dijadikan kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan pendidikan pada perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan mutu layanan. Oleh karena itu STKIP

dan STIE Kuningan seyogyanya melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan pemerintah dimana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Indikator Mutu Layanan dapat diketahui dari ; (1) ketersediaan biaya pendidikan yang cukup memadai ; (2) ketersediaan sarana fisik yang memadai ; (3) ketersediaan tenaga edukatif yang profesional dan (4) pelayanan pengabdian pada masyarakat yang cukup baik.

G. Metode Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Sifat analitik dari penelitian ini adalah langkah lanjutan dari deskripsi gejala dan peristiwa. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang aspek-aspek yang diteliti maka selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Analisis dilakukan berdasarkan kajian teori.

Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen (1982 : 27-30) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif mempunyai lima karakteristik, yaitu :

- (1) Peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama ;
- (2) Penelitian bersifat deskriptif ;

- (3) Lebih menekankan proses dari pada hasil sehingga bersifat deskriptif – analitik ;
- (4) Analisa data secara induktif ;
- (5) Essensi penelitian kualitatif adalah apa yang disebut dengan “meaning”.

Secara prinsip penelitian ini mengikuti karakteristik penelitian kualitatif tersebut di atas.

H. Lokasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) di Kuningan.

2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi kepada peneliti pada sekolah tinggi yang dimaksudkan. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara *purposive*. Berdasarkan uraian di atas, maka sampel penelitian ini terdiri dari : (1) Ketua STKIP dan STIE ; (2) Pembantu Ketua II; (3) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), (4) Kepala Pusat PPM. Sampel lainnya yang didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposif , yaitu

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jumlah sampel tidak dibatasi, tetapi tergantung pada pertimbangan kelengkapan data dan informasi yang dikumpulkan.

I. Definisi Operasional

a. **Pemberdayaan masyarakat**, yaitu upaya memampukan masyarakat kecil atau bawahan (karyawan, warga masyarakat) yang selama ini dianggap tidak atau kurang berperan agar meningkat dan memiliki kemampuan yang lebih baik sesuai dengan peranan mereka di dalam sistem sosial. Pemberdayaan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi manajer, yaitu :

- (1) Membuat mampu (*enabling*); Indikatornya dapat diukur dengan ; (1) menggali potensi diri sendiri; (2) mengenal kemampuan diri sendiri ; (3) menyediakan waktu untuk membantu pendidikan; dan (4) menyediakan personil pendukung ;
- (2) Memperlancar (*facilitating*); Kegiatan ini dapat diukur dengan ; (1) mempermudah aturan organisasi ; (2) mempersingkat prosedur ; (3) mempermudah memperoleh informasi ;
- (3) Berkonsultasi (*consulting*); Kegiatan ini dapat diukur dengan ; (1) membahas masalah teknis sehari-hari; (2) membahas masalah-masalah strategis ; dan (3) meningkatkan intensitas dialog ;
- (4) Bekerjasama (*collaborating*); Kegiatan ini dapat diukur dengan ; bekerjasama penuh sepanjang berkaitan dengan pendidikan; (2) menyediakan waktu untuk kerjasama yang berkaitan dengan pendidikan; dan (3) keterbukaan ;
- (5) Membimbing (*mentoring*); Kegiatan ini dapat diukur dengan ; bekerjasama penuh sepanjang berkaitan dengan pendidikan; (2) menyediakan waktu untuk kerjasama yang berkaitan dengan pendidikan; dan (3) keterbukaan ;
- (6) Mendukung (*supporting*) ; Kegiatan ini dapat diukur dengan ; (1) memimpin dari belakang dan (2) mengarahkan sikap mandiri.

b. **Pembiayaan Pendidikan Tinggi**, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan dan penyusunan anggaran pendidikan tinggi dengan indikatornya :

1. Identifikasi kegiatan, yaitu penyusunan program kurikuler dan program ekstra kurikuler ;
2. Identifikasi sumber-sumber dana ;
3. Formulasi anggaran, yang diukur dengan ; RAPBS dan Program insidental ;
4. Persetujuan yang berwenang, yang diukur dengan penyelenggaraan rapat-rapat dan kompromi anggaran.



